

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, DAN *Leverage* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI**

JAWA TIMUR TAHUN 2020-2022

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi



DIAJUKAN OLEH :

R. OLIVIA GRECITA YOLANDA

NPM : 20430035

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

2 **LEMBAR PENGESAHAN**

3 **SKRIPSI**

3 **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN *Leverage* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2021**

Diajukan Oleh :

R. OLIVIA GRECITA YOLANDA

20430035

2 **TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH**

DOSEN PEMBIMBING

2 Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak., M.Ak., CA.

Tanggal, 15 Juli 2024

KETUA PROGRAM STUDI

Lilik Mardiana, SE, M.Ak, Ak,CA.

Tanggal, 15 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Terima kasih saya ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus serta pada sahabat karib saya *Holy Spirit* sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya peneliti bisa menuntaskan skripsi berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022” di mana agar bisa menuntaskan Program Sarjana strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam semua proses yang terjadi dalam penyelesaian program sarjana hingga penyelesaian penulisan skripsi ini peneliti banyak memperoleh bimbingan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi peneliti, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang pada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K), FICS selaku Rektor dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Drs. Ec. Gimanto Gunawan, MM. M.Ak.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, ibu Lilik Mardiana, SE, M.Ak, Ak,CA.
4. Ibu Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak., M.ak., Ca selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih sudah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini hingga peneliti dapat menyelesaikannya.

5. Ayah saya Riyanto Eko Wahyono dan Ibu Ruth Moi Kare, Mama Kristiani selaku orang tua saya. Terima kasih sudah menjadi penyemangat serta motivasi tertinggi saya dalam proses awal memulai perkuliahan hingga proses penyelesaian dan akan memperoleh gelar sarjana. Semoga yola selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang manis untuk kalian walaupun banyak sekali yang masih belum terselesaikan.
6. Untuk ke 2 adik saya yang terkasih, R. Violetta Michelle A. dan R. Veronika Glori V. May, terima kasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini serta sudah menemani setiap proses yang dilalui hingga memperoleh gelar sarjana. Semoga kalian bisa menyusul dan memperoleh gelar sarjana berikutnya dalam keluarga kita.
7. Terima kasih pada saudara saya Icha, Gita, Joshua, Resta serta seluruh keluarga besar Kamakare dan Soedjono dalam pemberian saran, masukan serta motivasi selama awal proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman rohani saya Ko David, Vira, Ko Reyhan, Ce Winda, Melvin, Ce Anita, Ade, Ko Johan, serta teman-teman dari penilikan *Coach Ade* dan teman-teman *Army Of God* lainnya. Terima kasih sudah selalu hadir dan mendukung dalam doa.
9. Teman-teman saya saat masa abu-abu hingga saat ini, Arum Purnama sari dan Cicin Wulandari. Terima kasih sudah menemani dan selalu ada hingga proses penyelesaian program sarjana.

10. Kakak kelas saya saat masa abu-abu hingga saat ini, Shanti Rachimiwati dan Shinta Rachmawati. Terima kasih sudah selalu ada dan menemani peneliti hingga proses penyelesaian program sarjana.
11. Teman-teman Romusa, Anisa Nur Maulidyah, Salsabila Rohmatus Zahro, Dhea Ainur Rizky, Shinta Nur Rizky dan Dea Achmad Muharomi, terima kasih sudah menjadi teman yang berbagi pengalaman, pandangan dan berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana bersama-sama.
12. Rekan sekerja saya, terima kasih sudah menjadi mentor dan teman yang senantiasa mendukung di masa menuntaskan skripsi.
13. Bapak dan Ibu admin di Lembaga Badan Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih atas kesediaanya untuk bekerja sama selama proses permintaan data pengkajian.
14. Bapak dan Ibu Dosen, Tenaga Praktisi, Staff dan Karyawan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma di mana sudah menyalurkan bantuan pada penulis di masa penuntasan skripsi.
15. pada seluruh pihak di mana tak bisa disebutkan, terima kasih.

Surabaya, 1 Juli 2024

Penulis

R. Olivia Grecita Yolanda

20430035

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI	8
2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	8
2.1.2 UKURAN (<i>Size</i>) PEMERINTAH DAERAH	10
2.1.3 <i>Leverage</i>	12
2.1.4 KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	13
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	14
2.3 HIPOTESIS DAN MODEL ANALISIS.....	20
2.3.1 HIPOTESIS.....	20
2.3.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.3.1.2 Pengaruh Ukuran (<i>Size</i>) Pemerintah Daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.3.1.3 Pengaruh <i>Leverage</i> pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.2.2 MODEL ANALISIS	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN	24

2	3.2 POPULASI DAN SAMPEL	24
	3.3 IDENTIFIKASI VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	25
	3.3.1 Identifikasi Variabel	25
	3.3.2 Definisi Operasional Variabel	26
	3.3 JENIS DAN SUMBER DATA	28
	3.4 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA	29
6	3.5 TEKNIK ANALISIS DATA	29
	BAB IV HASIL PENELITIAN	34
	4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	34
	4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	35
	4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	37
	4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	41
63	4.5 Uji Hipotesis	43
	4.6 Pembahasan	46
18	4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	46
	4.6.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	47
	4.6.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	47
	BAB V SIMPULA, SARAN DAN KETERBATASAN	49
	5.1 Simpulan	49
	5.2 Saran	50
6	5.3 Keterbatasan	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4. 1 Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	34
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	37
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	38
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas	39
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokolerasi.....	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji F Simultan.....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji t Parsial	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Determinasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

2	Gambar 2. 1 Model Analisis	22
----------	---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Keuangan	56
Lampiran 2 : Uji Instrumen.....	62

ABSTRAK

Riset ini bermaksud guna menyajikan bukti empirik terkait pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* pada kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2022. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Data dimana dipakai ialah data sekunder dimana berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun 2020-2022.. Populasi penelitian mencakup 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dimana kemudian dijadikan sampel. Teknik sampling yang dipakai ialah *judgement sampling*. Data sampel yang sudah dikumpulkan dianalisis memakai program SPSS versi 20. Analisis itu mencakup uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Temuan riset menyatakan jika variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* masing-masing berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Dengan demikian, bisa diambil simpulan jika semua variabel bebas di riset ini berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The objective of this scholarly investigation is to provide empirical substantiation concerning the impact of local revenue, the magnitude of local government, and leverage on the fiscal performance of local governmental entities within the regencies and cities of East Java Province during the timeframe of 2020 to 2022. This research employs a descriptive quantitative methodology, concentrating on the entirety of regencies and cities situated in East Java. The dataset utilized consists of secondary data obtained from audit reports pertaining to the financial statements of regency and city governments in East Java for the years 2020 through 2022. The population for this research encompasses 38 regencies and cities located in East Java, which were subsequently utilized as the sample. The sampling methodology implemented is judgment sampling. The acquired sample data were subjected to analysis utilizing the SPSS version 20 software. The analytical procedures include descriptive statistical assessments, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The findings indicate that the variables of local revenue, the size of local government, and leverage exert a positive effect on the fiscal performance of local governments (Y). Consequently, it can be inferred that all bebast variables examined in this study significantly influence the fiscal performance of local governmental entities.

Keywords : Regional Original Income, Local Government Size, and Leverage, Financial Performance of Local Governments.

38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perekonomian Indonesia melibatkan berbagai fase utama di mana mencerminkan perubahan dalam aspek politik, sosial, dan budaya negara ini. Perkembangan ekonomi Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda, ketika Indonesia dikenal sebagai Nusantara, pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter serius di mana mengakibatkan depresiasi mata uang, inflasi tinggi, dan krisis keuangan yang parah. Pada puncaknya, pada tahun 1998, terjadi reformasi yang membawa perubahan politik dan reformasi ekonomi yang signifikan. Krisis yang terjadi pada tahun 1996-1997 mendorong pemerintah pusat untuk mengalihkan tanggungjawab pengelolaan keuangan pada daerah. Harapannya supaya daerah bisa mendanai pembangunan serta layanan publik dengan anggaran mereka sendiri (Azhar, 2008).

Pemerintah pusat menanggapi situasi itu dengan menerapkan kebijakan Otonomi Daerah, di mana memberi wewenang pada pemerintah daerah atau provinsi dalam mengatur sekaligus mengelola urusan mereka sendiri tanpa intervensi dari pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Kebijakan Otonomi Daerah yang diatur oleh UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, lalu diperbarui melalui UU No. 32 tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah, memberi kewenangan penuh pada kabupaten dan kota guna mengembangkan sekaligus memajukan

74

56

9

wilayah mereka. Kebijakan ini memungkinkan mereka untuk memakai dana dan penghasilan daerah untuk menambah APBD.

Jika pemerintah daerah terus mengandalkan keuangan dari dana perimbangan dimana disalurkan pemerintah pusat, tentu bisa berdampak negatif pada pelaksanaan program-program pemerintah yang tidak bisa berjalan dengan baik serta optimal. Pemda diharapkan bisa mengelolah sumber daya di mana dimiliki serta mengadakan tata kelola pemerintahan baik jadi dapat berimbas dalam pemberian layanan pada rakyat (Handra & Maryati, 2009).

Pemda punya kewajiban untuk mengelola administrasi, melaksanakan pembangunan, serta memberikan layanan pada masyarakat secara transparan dan akuntabel di pengelolaan keuangan, guna terwujudnya pemerintahan bersih sebagaimana dinyatakan dalam maklumat pelayanan. Hal ini diwujudkan caranya yakni laporan keuangan pemerintah daerah diajukan tepat waktu sekaligus sesuai standar akuntansi pemerintah dimana sudah diakui. Standar ini diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005. Salah satu prinsip dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah ialah pengungkapan penuh, yang mengharuskan laporan keuangan untuk menyajikan informasi secara kompleks dan bermanfaat teruntuk pengguna. Informasi ini harus disajikan baik pada halaman utama laporan keuangan maupun dalam pencatatan laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).

Penilaian kinerja termasuk elemen utama dalam pemberian *feedback* pada rancangan dimana sudah diterapkan dan memperlihatkan fungsi pengukuran kinerja dalam: (i) Menilai bagaimana program berjalan, (ii) Sebagai alat pembanding atas

13 layanan di mana disalurkan, (iii) Sebagai alat komunikasi ke publik. Di sisi lain, penilaian kinerja keuangan daerah juga penting dilaksanakan sebab kinerja pemerintahan daerah di negara ini masih punya citra yang buruk. Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengindikasikan kurangnya kejelasan sekaligus akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah, yang berakibat pada penilaian kinerja yang rendah. Kinerja pemerintah daerah juga dianggap rendah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dengan banyaknya kasus dugaan korupsi yang sering terjadi dilingkungan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan pentingnya pengukuran kinerja keuangan daerah.

13 Informasi dimana ada dalam laporan pertanggungjawaban atau LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk yang bermanfaat untuk menilai performa keuangan pemerintah daerah (Jurnawati et al, 2013). Data evaluasi kinerja finansial dimana diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, yang diukur menurut anggaran yang sudah disusun, menjadi sumber informasi guna meningkatkan program berikutnya dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik (Sari, 2016).

Kemakmuran suatu negara atau wilayah tergantung pada seberapa besar nilai tambah penghasilan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Pertumbuhan positif dalam nilai tambah ini akan menarik minat investor untuk mengalokasikan investasi di negara atau wilayah itu. Hal ini kemudian dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penghasilan antar pemerintah. Pada akhirnya, hal ini akan

meningkatkan belanja modal pemerintah daerah (Simanullang, 2013). Pada akhirnya, ini akan mengarah pada peningkatan pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh otoritas kota (Simanullang, 2013). Penilaian pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemeriksaan rasio indikasi otonomi keuangan di daerah, ditandai dengan atribut seperti transparansi, integritas, demokrasi, kemanjuran, efisiensi, dan akuntabilitas (Halim, 2013). Proporsi Pendapatan Asli Regional (PAD) relatif pada bantuan keuangan agregat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pinjaman yang diperoleh dari berbagai sumber berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi kemanjuran pemerintah dalam inisiatif pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menilai kapasitas daerah untuk memenuhi tujuan penghasil penghasilan.

Ukuran (*Size*) pemerintah daerah sebagai faktor penting di mana bisa memberikan pengaruh ke kinerja finansial mereka. Saat daerah/entitas punya ukuran besar, meningkatnya tuntutan masyarakat pada akuntabilitas juga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah bisa diukur melalui beberapa indikator seperti total aset, jumlah pegawai, total penghasilan, serta tingkat produktivitas. Dari beberapa indikator yang ada, total aset dipilih sebab punya stabilitas nilai yang lebih tinggi dibanding dengan penghasilan, total karyawan, dan jumlah produksi daerah. Menurut Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011), dan Syafitri (2012), total aset dipakai sebagai ukuran utama untuk menilai ukuran pemerintah daerah dimana makin besar aset di mana dipunyai, makin besar ukuran pemerintah daerah itu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dimana sudah disampaikan, peneliti berminat guna melaksanakan riset yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur."

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berikut ialah rumusan permasalahan di riset ini:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?
2. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Melaksanakan uji serta analisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.
2. Untuk melaksanakan uji serta analisis apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.

3. Untuk melaksanakan uji serta analisis apakah *Leverage* berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan jika riset ini secara teoritis bisa menambah wawasan terkait sejauh mana Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan *Leverage* mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan guna memperdalam pemahaman yang sudah diperoleh selama masa kuliah sehingga teori-teori yang dipelajari dapat diterapkan pada masalah-masalah yang relevan.

Secara praktis, penulis berharap riset ini bisa berfungsi selaku sumber informasi sekaligus referensi teruntuk mereka dimana ingin memahami lebih mendalam terkait peran Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan *Leverage* dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, riset ini ditujukan bisa jadi referensi pertimbangan untuk pemda untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan daerah, guna menyalurkan layanan yang lebih baik bagi rakyat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pajak daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang terkait dari masalah yang dihadapi, artikulasi masalah pengkajian, tujuan penyelidikan, dan kontribusi potensial dari pengkajian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teoritis di mana mendasari pendekatan pemecahan masalah di mana digunakan selama persiapan tesis, prinsip-prinsip dasar teori, penyelidikan empiris sebelumnya, hipotesis, dan kerangka analisis di mana berkaitan dengan pengkajian ini.

BAB III : METODE PENGKAJIAN

Bab ini menggambarkan metodologi pengkajian di mana relevan, pemilihan populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel tersebut, jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data dan teknik analisis di mana digunakan dalam pengkajian ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi komprehensif tentang subjek pengkajian, hasil analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan diskusi tentang temuan pengkajian.

BAB V : SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Bab ini mengartikulasikan simpulan di mana diambil dari pengkajian ini, menawarkan rekomendasi, dan mengidentifikasi keterbatasan di mana terkait dengan temuan pengkajian, serta saran tambahan di mana berasal dari penyelidikan ini.

22

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

22

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, PAD ialah sumber penghasilan daerah dimana dikumpulkan dan dipakai selaku modal oleh penda untuk membiayai pembangunan sekaligus berbagai usaha daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada suntikan dana dari pusat. Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan kemampuan mereka ketika mencari kemungkinan potensi sekaligus mengelola sumber daya di mana tersedia guna menambah penghasilan daerah itu. Makin baik pengelolaan pemerintah daerah, makin besar pembangunan dan perkembangan di daerah itu. Saat kontribusi PAD pada APBD meningkat, maka kinerja pemerintah dinilai makin membaik.

PAD yakni keseluruhan pemasukan daerah dimana asalnya dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam pengkajian dimana dilaksanakan oleh Sumarjo (2010), variabel kemakmuran dipakai guna menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah. Pendapatan di mana tinggi bisa memperlihatkan jika penda punya taraf kesejahteraan tinggi dibanding daerah di mana tingkat PAD rendah. Kemakmuran suatu daerah juga berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintahnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah punya kesempatan untuk lebih memaksimalkan seluruh potensinya guna mendapatkan PAD di mana tinggi.

Halim (2012: 96-98) mengungkap jika PAD dapat dikelompokkan jadi 4 macam penghasian, yakni :

1. Pajak daerah

UU No. 34 Tahun 2004 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika pajak daerah ialah kewajiban dimana harus dipenuhi oleh individu atau badan pada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan langsung di mana sepadan. Pajak ini bisa dipungut secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum di mana ada sekaligus dipakai guna mendanai aktivitas pemerintahan serta pembangunan di daerah itu. Yang termasuk pajak daerah, yakni pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel dan pajak tempat hiburan di mana ialah bagian dari pajak daerah serta pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pihak pemungut pajak itu.

2. Retribusi daerah

Pemungutan dimana dilaksanakan oleh pemda sebagai imbalan atas layanan perizinan khusus dimana eksklusif disalurkan Pemda guna keperluan bersama.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah di mana dibedakan

Penghasilan dimana diperoleh pemerintah daerah dari mengelola kekayaan daerah di mana sudah dibedakan.

4. Pendapatan asli daerah lainnya di mana itu sah

Jenis penghasilan dimana penerimaannya dari berbagai sumber milik pemerintah daerah.

2.1.2 UKURAN (*Size*) PEMERINTAH DAERAH

Banyak faktor di mana bisa dijadikan sebagai indikator untuk penilaian kinerja di mana dilaksanakan oleh pemerintah daerah, salah satunya memakai Ukuran (*size*) dari pemerintah daerah itu sendiri. Patrick (2007) dalam pengkajiannya memakai ukuran (*size*) selaku salah satu variabel dipakai guna mendeskripsikan struktur entitas. Sementara itu, Sudarmaji dan Sularto (2007) dalam pengkajiannya menyatakan jika *size* sebuah perusahaan bisa diukur melalui jumlah asetnya, arus penjualan, serta kapitalisasi pasar di mana sudah dimiliki. Mereka juga menyimpulkan jika makin besar jumlah aset sebuah perusahaan, tentu makin besar juga ukuran di mana dimiliki instansi itu. Ada beberapa aspek di mana bisa dipakai guna mengukur ukuran pemerintah daerah :

1. Anggaran dan Keuangan

- Anggaran Operasional

ialah besarnya anggaran di mana di lokasikan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Anggaran ini mencakup biaya administrasi, biaya gaji pegawai, biaya perawatan gedung, belanja alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

- Pendapatan Asli Daerah

ialah jumlah pemasukan di mana sudah didapatkan oleh pemma dari penghasilan di mana sah atau di mana berasal dari aset wilayah itu.

2. Jumlah Pegawai

ialah banyaknya jumlah pegawai baik tenaga ASN atau Non-ASN di mana bekerja di lingkup pemerintah daerah

3. Luas Wilayah dan Penduduk

- Luas Wilayah

ialah besarnya wilayah di mana dikelola oleh pemerintah daerah itu.

- Jumlah Penduduk

ialah jumlah penduduk meliputi angka pertumbuhan, angka perpindahan penduduk. Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk mengawasi jumlah penduduk di mana dimilikinya.

4. Kinerja Pelayanan Publik

- Tingkat Pendidikan

ialah kualitas dari tingkat pendidikan di mana disediakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud untuk memajukan wilayah pemerintahannya.

- Tingkat Kesehatan

ialah ketersediaan layanan fasilitas kesehatan masyarakat di mana disediakan oleh pemerintah sebagai wujud pelayanan prima.

5. Proyek Infrastruktur

ialah besarnya tingkat investasi perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan serta memperbaiki fasilitas dan layanan guna mendukung perekonomian dan pengembangan infrastruktur di mana dimiliki.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

ialah media atau alat di mana dipakai oleh pemerintah untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah daerah.

7. Indeks Transparansi dan Akuntabilitas

- Penerapan Teknologi Informasi

ialah inovasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai wadah.

- Pelaporan Kinerja

ialah kualitas tingkat pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.1.3 *Leverage*

Choiriyah (2010) menyatakan jika *leverage* ialah rasio antara total hutang dan rata-rata ekuitas, di mana mengindikasikan jika makin tinggi *leverage* suatu entitas, makin besar pula risikonya. Perwitasari (2010), dalam pengkajiannya menyatakan jika *leverage* juga mencerminkan sebuah struktur modal perusahaan di mana dapat mempengaruhi tingkat risiko ketidakmampuan untuk melunasi utang.

Menurut Weill (2003) *leverage* digambarkan dengan besaran utang di mana dimiliki pemerintah, berasal dari pihak eksternal dibanding dengan modal sendiri.

Dengan kata lain kinerja pemerintah dapat dikatakan buruk jika punya nilai *leverage* di mana tinggi karena sumber pendanaannya bukan berasal dari modal di mana dimiliki.

2.1.4 KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

UU No. 32 Tahun 2004 berisi terkait finansial daerah, di mana mencakup hak dan tanggung jawab daerah di mana aset moneter dinilai, serta semua entitas di mana mungkin dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana terdiri dari aset dan dana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai administrasi keuangan daerah, dimana “keuangan daerah merangkum semua hak dan kewajiban daerah di mana dievaluasi dalam istilah moneter untuk realisasi program pemerintah daerah”.

Bastian (2006) mengartikulasikan kinerja sebagai realisasi pengadaan sebuah aktivitas di mana bertujuan untuk memenuhi tujuan, misi, dan visi organisasi atau entitas tertentu. Selain itu, kinerja juga tercakup dalam kegiatan evaluatif suatu entitas selama durasi temporal tertentu, berfungsi sebagai metrik untuk menilai keberhasilan dalam upaya terkait pekerjaan (Azhar, 2008).

Intinya, kinerja finansial pemerintah merupakan komponen dari taraf perolehan hasil di mana berasal dari kegiatan dalam domain keuangan daerah, di mana mencakup penghasilan dan pengeluaran di tingkat daerah, dan dioperasionalkan dalam kerangka keuangan di mana ditetapkan oleh kebijakan di

mana berlaku dan ketentuan legislatif sepanjang periode anggaran di mana ditentukan. Kinerja keuangan juga ditandai dengan pencapaian di mana tercermin dalam rancangan pelaksanaan kegiatan pemerintah Daerah, di mana bertujuan mewujudkan visi dan misi melalui dimensi keuangan sebagaimana digambarkan dalam LKPD.

Pengukuran kinerja secara berkesinambungan dan konsisten dinilai dapat memberikan tanggapan di mana memungkinkan pemerintah dalam usaha memperbaiki secara berlanjut agar meraih target masa depan (Bastian, 2006:275). Evaluasi kinerja tidak hanya penting bagi lembaga atau organisasi di mana mencari keuntungan, tetapi juga punya peran krusial bagi lembaga dan organisasi non-profit. Tujuannya ialah untuk menilai segala kebijakan di mana sudah berlangsung dalam rangka menjalankan tugasnya untuk pembangunan dan pelayanan publik, di mana tercermin dalam LKPJ (Sesotyaningtyas, 2012). Penilaian kinerja dianggap krusial saat penilaian akuntabilitas suatu instansi ketika meningkatkan layanan lebih baik.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ialah tabel di mana berisi mengenai pengkajian di mana telah ada sebelumnya :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
	Hendro Sumarjo (2010)	“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1) 2. Kemakmuran (X2) 3. Ukuran Legislatif (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. <i>Intergovernmen- tal revenue</i> (X5) 6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>) berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah 2. <i>Intergovernmen- tal revenue</i> berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah 3. <i>Leverage</i> berdampak ke kinerja finansial

				pemerintah daerah
	Gideon Simanullang (2013)	“Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Penghasilan Asli Daerah Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal (X1) 2. Intergovernmental Revenue (X2) 3. Penghasilan Asli Daerah (X3) 4. Kinerja Keuangan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan 2. Intergovernmental Revenue berpengaruh pada Kinerja Keuangan 3. Penghasilan Asli Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan
	Fauzan Jauhar (2016)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(X1) 2. Dana Alokasi Umum (X2) 3. Dana Alokasi Khusus (X3) 	PAD Berpengaruh Pada Kinerja Keuangan

		Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat”	4. Belanja Modal (X4) 5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	
	Reny Retnowati (2016)	“Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> Dan <i>Intergovernmental Revenue</i> Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	1. Tingkat Kekayaan Daerah (X1) 2. Belanja Daerah(X2) 3. Ukuran Pemerintah (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. <i>Intergovernmental Revenue</i> (X5) 6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Belanja Daerah Berpengaruh pada Kinerja Keuangan 2. Ukuran Pemerintah Berpengaruh pada Kinerja Keuangan
	Indah Puspa Sari, R	“Pengaruh Ukuran	1. Pengaruh Ukuran	1. Ukuran pemerintah

	<p>Agusti, R Rofika (2016)</p>	<p>Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, <i>Leverage</i>, Dana Perimbangan Dan Ukuran LEGislatif Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”</p>	<p>Pemerintah Daerah (X1) 2. Pendapatan Asli Daerah (X2) 3. <i>Leverage</i> (X3) 4. Dana Perimbangan (X4) 5. Ukuran Legislatif (X5) 6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	<p>daerah berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah 2. PAD berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah 3. Dana perimbangan berdampak ke kinerja finansial pemerintah daerah</p>
	<p>Moh. Sirril Wafa (2018)</p>	<p>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i>, Dana Perimbangan Dan</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 2. Ukuran Pemerintah Daerah(X2) 3. <i>Leverage</i> (X3)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh pada Kinerja Keuangan</p>

11

		Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	4. Dana Perimbangan (X4) 5. Belanja Modal (X5) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	
	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019)	“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1) 2. Pendapatan Asli Daerah (X2) 3. Belanja Daerah (X3) 4. Kinerja Keuangan (Y)	1. PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan 2. Belanja Modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan
	Dwi Saraswati S.Pd, M.Si	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran	1. Pendapatan Asli Daerah (X1)	1. PAD berpengaruh pada Kinerja Keuangan

dan Yunita Sari Rioni S.E, M.Si, Ak, CA (2019)	Pemerintah Daerah, Dan <i>Leverage</i> Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	2. Ukuran Pemerintah (X2) 3. <i>Leverage</i> (X3) 4. Kinerja Keuangan (Y)
--	---	---

2.3 HIPOTESIS DAN MODEL ANALISIS

2.3.1 HIPOTESIS

2.3.1.1 Dampak Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Riset dimana dilaksanakan oleh Simanulla (2013) memaparkan jika ada hubungan antara PAD dan kinerja pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Temuan riset itu memperlihatkan jika PAD berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah. Saraswati dan Rioni (2019) memproksikan Pendapatan Asli Daerah juga berdampak Positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dari paparan itu, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H1 : PAD berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.1.2 Pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011), serta Syafitri (2012), ukuran pemerintah daerah dinilai berdasarkan total aset di mana dimilikinya. Ketika pemerintah daerah berukuran besar, hal ini dapat mempengaruhi operasionalnya dan mempermudah penyediaan layanan di mana memadai pada masyarakat. Selain itu, kemudahan operasional ini juga berdampak positif pada proses peningkatan PAD, di mana berkontribusi pada kemajuan daerah selaku tanda peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dengan kata lain, makin besar ukuran pemerintah tentu akan makin baik juga kinerja penilaian pemerintah daerah di wilayah itu (Sumarjo, 2010). Berdasarkan paparan itu, maka peneliti merumuskan hipotesis :

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.1.3 Pengaruh *Leverage* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

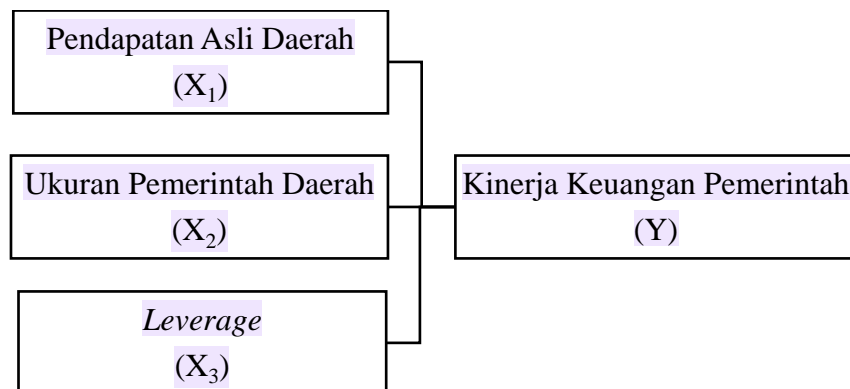
Sumarjo (2010) menyatakan jika rasio ini memperlihatkan tingkat beban utang di mana ditanggung oleh pemerintah daerah pada pihak luar. Ketika *leverage* milik daerah itu kian tinggi, perihal itu memperlihatkan jika kinerja dari keuangan daerah itu makin buruk. Dimana maknanya daerah itu tidak bisa membiayai kegiatannya sendiri dan memerlukan dana pinjaman dari pihak eksternal.

47 Dari hasil riset dimana dilaksanakan Sumarjo (2010) mengemukakan jika *leverage* berdampak pada kinerja finansial pemerintah daerah. Dari paparan sebelumnya peneliti mengajukan rumusan dugaan:

3 **H3 : *Leverage* berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.**

2.2.2 MODEL ANALISIS

Berlandaskan uraian sebelumnya, berikut ialah model dari kerangka pemikiran pada riset ini :



Gambar 2. 1 Model Analisis

22

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Di pengkajian ini, metodologi kuantitatif diadopsi, di mana penelitian terutama berfokus pada pengujian hipotesis. Data di mana digunakan dapat diukur dan diantisipasi untuk menghasilkan kesimpulan di mana berlaku secara luas. Studi ini menggunakan teknik pengujian dugaan klasik di samping pengujian hipotesis melalui analisis regresi linier berganda dan evaluasi statistik.

24

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Populasi di mana dipakai di riset ini ialah 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

3.2.2 Sampel

Berdasarkan cara pengambilan sampel memakai *judgement-sampling* dimana bermakna memilih sampel menurut kriteria di mana sudah ditentukan sebelumnya (Jogiyanto, 2005). Laporan keuangan pemerintah daerah dimana sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Dimana seluruh populasi dijadikan sampel pengkajian dengan tahun amatan selama 3 tahun.

4

3.3 IDENTIFIKASI VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL

VARIABEL

3.3.1 Identifikasi Variabel

3.3.1.1 Variabel Bebas (X)

1. Pendapatan Asli Daerah

Penghasilan dimana dihasilkan dari berbagai sumber daya serta potensi di mana ada di suatu daerah. Total PAD di mana didapat dari laporan Realisasi Anggaran (LRA) kemudian dibagi dengan nilai di mana sama untuk semua sampel di mana ada.

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Proksi dimana dipakai guna mengukur variabel ukuran pemerintah daerah ialah total aset di mana dibagi dengan angka di mana sama pada seluruh sampel, di mana diperoleh dalam laporan neraca daerah.

3. *Leverage*

Menurut pengkajian Sumarjo (2010), *leverage* ialah representasi dari total hutang dibanding dengan rata-rata ekuitas. Sementara itu, pengkajian Weill (2003) memperlihatkan jika *leverage* menggambarkan sejauh mana pemerintah punya kewajiban dari sumber eksternal dibanding dengan modalnya sendiri.

3.3.1.2 Variabel Terikat (Y)

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah ialah kapasitas pemerintah dalam mencapai target dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik, meliputi berbagai aspek seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, defisit anggaran, dan utang daerah. Selain itu, kinerja keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan jika kebijakan di mana diterapkan efektif dalam mendukung program kerja pemerintah atau sebaliknya.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

3.3.2.1 Variabel Bebas

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumarjo (2010) di pengkajiannya, menggunakan variabel Pendapatan Penduduk Asli Daerah (PAD) untuk menjelaskan kesejahteraan daerah tertentu. PAD di mana tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan lokal menunjukkan tingkat kesejahteraan tinggi/signifikan dibanding dengan daerah di mana punya PAD lebih rendah. Tingkat kesejahteraan di mana tinggi juga memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja. Dengan penerapan desentralisasi, pemda mendapatkan peluang di mana setara untuk mengembangkan seluruh potensi di mana ada di tiap wilayahnya. PAD mencakup semua pendapatan regional, di mana berasal dari sumber daya ekonomi intrinsik lokalitas. Penilaian PAD dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: Pajak Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan aset daerah terpisah, dan sumber PAD di mana sah lainnya.

2. Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Bisa diukur memakai proksi dari jumlah aset punya pemerintah. Dimana asset dimiliki bisa membantu kinerja dari pemerintah. Pemerintah dimana punya aset besar diperkirakan mampu menyediakan layanan di mana lebih baik pada masyarakat.

3. *Leverage*

Bisa diukur memakai rasio utang pada ekuitas (DER), yakni sebuah metode dengan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas dimana tercantum di LKPD. *Debt Equity Ratio* (DER) bisa diperhitungkan memakai rumusan :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.2 Variabel Terikat

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009:121) menggambarkan jika akuntabilitas tidak hanya memperlihatkan bagaimana dana publik dipakai, tetapi juga memperlihatkan penggunaannya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Menurut Saraswati dan Rioni (2019) menyatakan, ada cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah ialah dengan menerapkan penganalisis rasio pada APBD dimana sudah disusun sekaligus

diimplementasikan. Analisis rasio keuangan pada APBD memungkinkan perbandingan hasil antar periode, di mana dapat memberikan gambaran terkait tren di mana mungkin terjadi di masa depan (Halim, 2012: 232). Halim (2012: 232-241) dalam pengkajiannya mengembangkan beberapa rasio untuk tujuan itu. Namun peneliti memilih untuk melaksanakan pengkajian pada Rasio Efisiensi dalam pengukuran variabel terikat. Rasio efisiensi dapat di hitung dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pemasukan}}$$

Dimana Total Realisasi Pengeluaran ialah biaya di mana dikeluarkan untuk memungut PAD (Belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan) dan Total Realisasi Pemasukan ialah PAD itu sendiri.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Di pengkajian ini, informasi dimana dipakai ialah data sekunder yakni Laporan Hasil Pemeriksaan di mana didapat dari permintaan pada BPK-II Jatim melalui website resmi EPPID di mana ialah situs resmi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BPK RI www.e-ppid.bpk.go.id/PPID serta data lainnya diperoleh melalui website resmi lain.

3.4 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Riset ini memakai data dimana sudah tersedia sekaligus ialah hasil pengumpulan serta olahan di mana dilaksanakan pihak luar (Muhidin dan Abdulrahman, 2007:17). Peneliti menggunakan data sekunder karena data ini sudah diverifikasi oleh pihak lain, sehingga validitasnya terjamin dan dapat diandalkan dalam pengkajian. Data sekunder dimana dipakai di riset ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2006) menggambarkan statistik deskriptif yakni melibatkan pemeriksaan rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, angka maksimum, dan nilai minimum dari sampel. Tujuan dari analisis ini adalah agar menggambarkan komprehensif tentang distribusi serta atribut dari sampel yang diperoleh.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pada riset ini, peneliti menerapkan metode analisis regresi berganda, karena melibatkan satu variabel terikat serta beberapa variabel bebas (Sekaran, 2006). Sebelum melaksanakan analisis regresi berganda, peneliti butuh melaksanakan tes dugaan klasik terlebih dahulu. Selanjutnya ialah macam-macam uji dari uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Di konteks model regresi, uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah variabel terikat dan bebas menunjukkan distribusi normal. Model regresi yang efektif ditandai dengan adanya distribusi normal (Ghozali, 2006). Dalam pengujian, alat di mana sering dipakai ialah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dianggap punya distribusi normal jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Namun, jika probabilitasnya berada dibawah 0,05, maka data itu akan dianggap tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi apakah ada perbedaan varian antara residu dari satu pengamatan dengan residu dari pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Dalam pengkajian ini, peneliti akan memakai uji Glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual pada variabel bebas. Jika nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas punya tujuan untuk menganalisis apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2005). Atau dengan kata lain, model regresi yang baik ialah saat dimana tidak terjadi adanya korelasi antar variabel bebas. ada cara yang dapat dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada uji multikolinieritas ialah dengan memeriksa faktor *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

50 Apabila nilai VIF < 10 dan TOL $> 0,1$, maka model regresi itu dianggap bebas dari multikolinieritas.

d. Uji Autokolerasi

Bermaksud guna mengevaluasi apakah ada kecenderungan keterikatan antara nilai-nilai dalam suatu deret waktu. Autokorelasi timbul sebab adanya keterikatan antara observasi yang berurutan sepanjang waktu. Tipe regresi ideal ialah model dimana bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). Di riset ini, peneliti akan memakai uji *run test* memakai *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Apabila signifikansi $> 0,05$, jadi taka da gejala autokorelasi baik secara positif maupun negatif (Ghozali, 2005).

36 **3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Ghozali (2016) menjelaskan target dari penggunaan regresi linier berganda ialah guna mengidentifikasi memastikan keberadaan hubungan potensial antara variabel terikat dan variabel bebas, sangat penting ketika menyelidiki tingkat, atau besarnya, serta arah pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Analisis khusus ini digunakan dengan cermat untuk memastikan sejauh mana variabel bebas, yang secara khusus diidentifikasi sebagai Pendapatan Pribumi Regional (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dan Leverage (X3), memberikan dampak pada variabel terikat, yang dalam konteks ini didefinisikan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Teknik analitik regresi linier berganda dipakai bersamaan SPSS, di mana memfasilitasi perumusan serta interpretasi persamaan regresi yakni:

29

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah,

Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Ukuran Pemerintah Daerah

X3 = *Leverage*

3.5.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Metode dimana dipakai guna menentukan variabel bebas dalam suatu model punya dampak yang sama pada variabel terikat. Dalam proses pengujian kelayakan data, uji statistik F diterapkan dengan syarat-syarat berikut: (1) Hasil pengujian memperlihatkan tingkat signifikansi sejumlah $\alpha = 0,05$. (2) Kriteria pengujian ialah jika $p\text{-value} < \alpha$, ini memperlihatkan jika variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sedangkan jika $p\text{-value} > \alpha$, ini berarti sebaliknya (Ghozali, 2016).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t ialah sebuah uji yang mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dengan tingkat signifikansi sejumlah 0,05 ($\alpha=5\%$). ada beberapa kriteria dalam pengujian nilai, yakni : (1) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dimana variabel bebast tidak berpengaruh yang signifikan pada variabel terikat. (2) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Yang punya arti jika variabel bebas berpengaruh yang signifikan pada variabel terikat (Ghozali, 2016).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dipakai guna menggambarkan interval di mana variabel bebas secara kolektif menawarkan penjelasan yang koheren untuk variabel terikat, terutama ketika nilai R^2 berada dalam kisaran inklusif 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan tidak ada kekuatan penjelas dan nilai 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang sempurna (Ghozali, 2016).

19

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

Provinsi Jawa Timur ialah provinsi dimana terletak di timur pulau jawa dengan Luas wilayah mencapai 48.033 km² di mana total individu yakni 41.149.974 jiwa pada tahun 2022, padatan penduduk mencapai 857 jiwa/km² dengan punya 38 Kota/Kabupaten yang tersebar dengan ibu kotanya ialah Kota Surabaya. Berikut ialah Populasi yang sekaligus sampel di riset ini yang ialah 38 Kota/Kabupaten dari

Provinsi Jawa Timur :

23

Tabel 4. 1**Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

4

1	Kabupaten Bangkalan	20	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Banyuwangi	21	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Blitar	22	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bondowoso	23	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Bojonegoro	24	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Gresik	25	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jember	26	Kabupaten Sumenep
8	Kabupaten Jombang	27	Kabupaten Trenggalek
9	Kabupaten Kediri	28	Kabupaten Tuban

10	Kabupaten Lamongan	29	Kabupaten Tulungagung
11	Kabupaten Lumajang	30	Kota Batu
12	Kabupaten Madiun	31	Kota Blitar
13	Kabupaten Magetan	32	Kota Kediri
14	Kabupaten Malang	33	Kota Madiun
15	Kabupaten Mojokerto	34	Kota Malang
16	Kabupaten Nganjuk	35	Kota Mojokerto
17	Kabupaten Ngawi	36	Kota Pasuruan
18	Kabupaten Pacitan	37	Kota Probolinggo
19	Kabupaten Pamekasan	38	Kota Surabaya

Sumber : Data Sekunder tahun 2020-2022

28 Penelitian memakai data sekunder dimana diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 di mana sudah diaudit oleh BPK RI. Peneliti mendapatkan laporan keuangan itu dari website lembaga pengelola sistem informasi terpadu milik Instansi BPK-RI.

3 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

6 Dipakai guna menjelaskan terkait nilai rata-rata (mean), nilai paling tinggi (maximum), nilai paling rendah (minimum), dan nilai standar deviasi dari variabel bebas dan terikat.

Tabel 4. 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	0,01318	0,53147	0,0555691	0,07691832
UPD	114	0,03265	0,94263	0,1078517	0,14306984
<i>Leverage</i>	114	0,00174	0,08490	0,138656	0,01538226
Kinerja Keuangan	114	1,65403	28,37950	5,9576344	3,62454831
Valid N (Listwise)	114				

Sumber : Data Utama Diolah, 2024

Dari perolehan tes statistik deskriptif sebelumnya bisa dipahami distribusi data di mana diperoleh:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), dari data itu dapat dideskripsikan nilai minimum 0,01318 sedangkan nilai maksimum 0,53147 dan nilai mean pendapatan asli daerah 0,0555691 dengan standar deviasi 0,07691832.
2. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dari data itu dapat dideskripsikan nilai minimum 0,03265 sedangkan nilai maksimum 0,94263 dan nilai mean ukuran pemerintah daerah 0,10798517 dengan standar deviasi 0,14306984.
3. Variabel *Leverage* (X3), dari data itu dapat dideskripsikan nilai minimum 0,00174 sedangkan nilai maksimum 0,08490 dan nilai mean *leverage* 0,0138656 dengan standar deviasi 0,01538226.
4. Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), dari data itu dapat dideskripsikan nilai minimum 1,65403 sedangkan nilai maksimum 28,37950 dan nilai mean 5,9576344 dengan standar deviasi 3,6254831.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Seperti yang sudah dijelaskan peneliti pada bab 3 dalam metode penelitian, jika sebelum mengerjakan Analisis Regresi Berganda penting dilaksanakan tes asumsi klasik dulu. Berikut ialah hasil yang diperoleh sesudah melaksanakan pengujian :

4.3.1 Uji Normalitas

Sumarjo (2010) menyatakan jika model regresi yang dibangun dengan baik dicirikan oleh sifat bahwa distribusi nilai residu, yang merupakan perbedaan antara hasil yang diamati dan yang diprediksi, mendekati distribusi normal atau cukup dekat dengan menunjukkan normalitas. Dalam konteks penyelidikan penelitian saat ini, serangkaian tes statistik dilaksanakan melalui cermat memakai metode Kolmogorov-Smirnov, di mana merupakan uji nonparametrik, agar menilai normalitas nilai residu yang berasal dari persamaan model regresi di mana dipakai selama pengkajian. Berikut ialah hasil di mana diperoleh:

Tabel 4. 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandarized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7

32

	Std. Deviation	2,22860833
Most Extreme Differences	Absolute	0,105
	Positive	0,105
	Negative	-0,077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,161

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Data Utama Diolah, 2024

3

Data akan dikatakan punya distribusi normal saat nilai signifikansi > 0,05 dan bila nilai signifikansi < 0,05 tentu bisa dipastikan data itu tak berdistribusi normal. Berasal table diatas, diperoleh hasil nilai signifikasi sejumlah 0,161 yang > 0,05, maknanya riset ini sesuai asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Di analisis heteroskedastisitas, peneliti memakai metode uji glejser. Tes Glejser dilaksanakan melalui meregresi variabel bebast ke Variabel Absolute Residual (Abs_Res). Berikut ialah *output* yang diperoleh sesudah dilaksanakan pengujian :

Tabel 4. 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

62

Model		Sig
1	(Constant)	0,000
	PAD	0,663

	UPD	0,182
	Leverage	0,437

Sumber : Data Utama Diolah, 2024

Berlandaskan *output* yang didapat melalui tes glejser dan dilaksanakan transformasi data dengan memakai metode logaritma natural di atas, memperlihatkan jika nilai toleransi dari tiap variabel sejumlah >0,05 dimana Pendapatan Asli Daerah (X1) punya nilai signifikansi sejumlah 0,663, Ukuran Pemerintah Daerah (X2) punya nilai signifikansi sejumlah 0,182, dan *Leverage* (X3) punya nilai signifikansi sejumlah 0,437 dimana maknanya dari ketiga variabel itu tak ada heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Multikolinieritas

Dilaksanakan dengan tujuan guna bisa diketahui jika dalam model regresi ada kolerasi antara variabel bebas. Dalam pengujian keberadaan Multikolinieritas bisa dipakai nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*. Saat VIF memperlihatkan nilai <10 dan *tolerance* memperlihatkan nilai >0,1 jadi tak ada multikolinieritas antar variabel. Selanjutnya *output* yang diperoleh yakni:

Tabel 4. 5

Output Uji Multikolinieritas

Coefficients

Model		Collinierity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		

	PAD	0,111	8,978
	UPD	0,111	8,993
	<i>Leverage</i>	0,994	1,006

Source : Data Utama Diolah, 2024

Dari temuan riset itu, tiap variabel punya VIF < 10 dan *tolerance value* > 0,1, dimana Pendapatan Asli Daerah (X1) punya nilai VIF sejumlah 8,973 < 10 dan *tolerance value* sejumlah 0,111 > 0,1, Ukuran Pemerintah Daerah (X2) punya nilai VIF sejumlah 8,993 < 10 dan *tolerance value* sejumlah 0,111 > 0,1, dan *Leverage* (X3) punya nilai VIF sejumlah 1,003 < 10 dan *tolerance value* sejumlah 0,994 > 0,1. Jadi, bisa diambil simpulan jika riset ini bebas dari Multikolinieritas.

4.3.4 Uji Autokolerasi

Punya tujuan guna mengevaluasi apakah terjadi kecenderungan keterikatan antar nilai-nilai dalam suatu deret waktu. Dalam pengujian ini, peneliti akan memakai metode Durbin Watson memakai *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

Tabel 4. 6

Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,011

Sumber : Data Utama diolah, 2024

79

43

Sesudah dilaksanakan pengkajian jadi diperoleh nilai Durbin Watson sejumlah 1,011. Data akan dianggap bebas Autokolerasi apabila $DU < DW < 4 - DU$, maka diperoleh hasil :

52

- $N = 114, K = 3$
- Nilai $DL = 1,6410$, Nilai $DU = 1,7488$
- Nilai $4 - DU = 2,2512$
- $1,7677 < 1,011 < 4 - 1,7488$

Dapat disimpulkan jika data itu tak autokolerasi.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari penganalisisan ini ialah guna menentukan jika terdapat keterkaitan antara variabel bebas serta variabel terikat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi jawa timur. Sesudah melaksanakan pengolahan data memakai IBM SPSS Statistik 23 bisa diperoleh hasil :

4

Tabel 4. 7

Output Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients
	B

59

1	(Constant)	5,869
	Pendapatan Asli Daerah	-109,324
	Ukuran Pemerintah Daerah	53,107
	<i>Leverage</i>	31,470

Sumber : Data Utama Diolah, 2023

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$
$$= 5,869 - 109,324 + 53,107 + 31,470$$

Berdasarkan data diatas, maka dapat di simpulkan :

1. Nilai α sejumlah 5,869 ialah konstanta atau kondisi saat variabel kinerja finansial pemerintah belum dipengaruhi variabel lain yakni pendapatan asli daerah (X1), ukuran pemerintah daerah (X2), dan *leverage* (X3). Bila variabel bebas tak ada jadi variabel kinerja keuangan pemerintah tak berubah.
2. Nilai β_1 (nilai koefisien regresi) X1 sejumlah -109,324 memperlihatkan jika variabel PAD tak ada pengaruh positif pada variabel kinerja keuangan pemerintah, dimana bermakna jika penurunan 1 satuan variabel penghasilan asli daerah jadi bisa mempengaruhi variabel kinerja keuangan pemerintah daerah sejumlah -109,324 bersama dugaan jika variabel lainnya tak dikaji di riset ini.
3. Nilai β_2 (nilai koefisien regresi) X2 sejumlah 53,107 memperlihatkan jika variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh yang positif pada variabel kinerja keuangan pemerintah, berarti jika kenaikan 1 satuan variabel ukuran pemerintah daerah akan mempengaruhi variabel kinerja

finansial pemerintah sejumlah 53,107 serta dugaan jika variabel lainnya tak dikaji di pengkajian ini.

4. Nilai β_3 (nilai koefisien regresi) X3 sejumlah 31,470 memperlihatkan jika variabel *leverage* ada pengaruh positif pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana bermakna jika kenaikan 1 satuan variabel *leverage* maka akan mempengaruhi variabel kinerja keuangan pemerintah daerah sejumlah 31,470 dengan asumsi jika variabel lain tidak diteliti di riset ini.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F (Simultan)

Dilaksanakan guna menetapkan apakah seluruh variabel bebas berdampak pada variabel terikat. Apabila signifikansi $<0,05$.

Tabel 4. 8

Output Uji F Simultan

ANOVA^a

Model		F	Sig
1	(Constant)	60,320	0,000 ^b
	Pendapatan Asli Daerah		
	Ukuran Pemerintah Daerah		
	<i>Leverage</i>		

Source : Data Diolah, 2024

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh jika signifikansi $0,000 < 0,05$ serta f hitung sejumlah 60,320, maka Pendidikan Asli Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dan *Leverage* (X3) berpengaruh secara simultan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

4.5.2 Uji t

Uji yang dipakai guna menguji besarnya variabel bebas seperti pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* pada variabel terikat kinerja finansial pemerintah daerah. Apabila nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, ada beberapa kriteria penilaian dalam kasus jika t hitung mendapat nilai negatif, yakni : 1) jika $-t$ hitung $< -t$ tabel, hipotesis diterima. 2) jika $-t$ hitung $> -t$ tabel, hipotesis tidak diterima.

Tabel 4.9

Hasil Uji t Parsial

Coefficients^a

Model		t	Sig
1	(Constant)	17,553	0,000
	Pendapatan Asli Daerah	-13,208	0,000
	Ukuran Pemerintah Daerah	11,924	0,000
	<i>Leverage</i>	2,272	0,025

Sumber : Data Utama Diolah, 2024

Berlandaskan table 4.8 diperoleh hasil :

1. Variabel pendapatan asli daerah punya nilai signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$ serta t hitung sejumlah $-13,208$. Hal ini memperlihatkan jika pendapatan asli daerah berdampak ke kinerja finansial pemerintah daerah.
2. Variabel ukuran pemerintah daerah punya nilai signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$ serta t hitung sejumlah $11,924$. Hal ini memperlihatkan jika ukuran pemerintah daerah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Variabel *leverage* punya nilai signifikansi sejumlah $0,025 < 0,05$ dan t hitung sejumlah $2,272$. Perihal itu memperlihatkan variabel ada pengaruhnya ke kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Penganalisisan koefisien determinasi ganda (R^2) berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat variabilitas fluktuasi variabel pendapatan asli daerah, skala tata kelola daerah, dan dampak leverage pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Determinasi

Model	R Square
1	0,622

Source : Data Utama Diolah, 2024

Dari tabel 4.10 diperoleh angka R square sejumlah $0,622$ perihal itu bermakna jika Pendapatan Asli Daerah (X_1), Ukuran Pemerintah Daerah (X_2), dan *Leverage* (X_3) berpengaruh secara simultan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sejumlah $62,2\%$. Hasil ini mengindikasi jika variabel bebas di riset ini

bisa menjelaskan variabilitas variabel terikat sejumlah 62,2%. Lalu, sisanya sejumlah 37,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar pengkajian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Dalam pengkajian ini kinerja keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai variabel terikat, sementara pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* sebagai variabel bebas. Hasil dalam pengujian pada riset ini secara empiris berhasil membuktikan jika hipotesis pertama, kedua dan ketiga dapat diterima.

Pendapatan Asli Daerah ialah termasuk elemen ke-bebasan daerah, jadi wajib senantiasa didorong bertumbuhnya hal itu (Halim, 2004). Dari temuan riset yang dilaksanakan tampak jika pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh pada kinerja finansial pemerintah daerah (Y) dimana table 4.9 memperlihatkan jika nilai t dari variabel pendapatan asli daerah sejumlah -13,208 dan punya nilai sig. sejumlah $0,000 < 0,05$. Maka, hipotesis ke-1 di pengkajian ini diterima.

Walaupun banyak didapati jika masih banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam memanfaatkan kekayaan daerahnya masing-masing, tetapi perihal itu tidak mempengaruhi hasil dari pengkajian yang dilaksanakan. Riset ini relevan dengan riset yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Saraswati dan Rioni (2018).

4.6.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Pada Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah diwakili oleh total asset yang dimiliki, yang dipakai sebagai indikator kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Dari temuan riset dimana dilaksanakan tampak jika ukuran pemerintah daerah (X2) berpengaruh pada kinerja finansial pemerintah daerah (Y) dimana tabel 4.9 menampakkan jika nilai t dari variabel ukuran pemerintah daerah sejumlah 11,924 dan punya nilai sig. sejumlah 0,000 di mana $< 0,05$. Jadi, hipotesis kedua dimana mengemukakan ukuran pemerintah daerah berdampak pada kinerja finansial pemerintah daerah ada bukti jika itu benar.

Makin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka makin besar pula kegampangan yang dirasakan oleh pemerintahan daerah itu. Perihal itu membuktikan jika kinerja keuangan pemerintah daerah akan memberikan dampak baik apabila suatu pemerintah daerah punya total aset besar, dengan pengelolaan keuangan yang optimal dengan harapan dapat menghasilkan kinerja yang sebanding dengan tujuan pemerintahan daerah saat melaksanakan layanan yang baik pada masyarakat. Pengkajian ini relevan ke pengkajian di mana sudah dilaksanakan sebelumnya menurut Retnowati (2016), Sari (2016).

4.6.3 Pengaruh *Leverage* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage didefinisikan yakni kapabilitas di mana dimiliki suatu daerah dalam membiayai urusan daerahnya dengan utang pada pihak ke tiga, dengan kata lain pemerintah daerah masih belum punya kemampuan untuk membiayai urusannya dengan modalnya sendiri. *Leverage* dapat mempengaruhi kinerja

12 keuangan pemerintah melalui berbagai aspek, termasuk pengelolaan risiko, pengelolaan utang dan stabilitas keuangan jangka Panjang. Wild et.al (2005) dalam Kusumawardani (2012) menyatakan jika *leverage* bisa diukur melalui *total debt ratio*, *total debt to equity*, *long-term debt to equity ratio*. Berdasarkan hasil pengkajian yang sudah dilaksanakan dapat dilihat bawa *leverage* (X3) berdampak secara signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Dimana table 4.9 memperlihatkan jika nilai t dari variabel *leverage* sejumlah 2,272 dengan nilai sig. sejumlah $0,025 < 0,05$. Riset ini pun relevan pada pengkajian di mana dilaksanakan Sumarjo (2010) mengemukakan jika *leverage* berdampak signifikan pada kinerja finansial pemerintah. Jadi, hipotesis ke tiga dalam pengkajian ini diterima.

77

60

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1 Simpulan

19 Dari pengujian hipotesis dimana sudah dilaksanakan di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur, didapat kesimpulan jika : seluruh hipotesis di mana diajukan di pengkajian ini diterima dan memberikan 31 pengaruh secara positif pada kinerja finansial pemerintah daerah.

- 18 1. Pendapatan asli daerah memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikan dari uji t sejumlah 0,000, yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan pada kinerja finansial pemerintah daerah.
- 26 2. Ukuran pemerintah daerah mempengaruhi signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikan dari uji t sejumlah 0,000, yang berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan pada kinerja finansial pemerintah daerah.
- 47 3. *Leverage* memberikan pengaruh signifikan pada kinerja finansial pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikansi dari uji t sejumlah 0,025, dimana bermakna *leverage* mempengaruhi secara signifikan pada kinerja finansial pemerintah daerah.

5.2 Saran

1. Pemerintah terkait

Diharapkan pemerintah terkait dapat memberikan sistem informasi yang lebih terpadu. Tidak hanya melalui *website* dan *call center whatsapp* saja namun bisa melalui layanan telepon seluler atau di sosial media. Dengan melaksanakan kampanye secara aktif dengan menyatakan jika semua warga negara Indonesia dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing disesuaikan dengan tujuan permintaan data itu.

2. Universitas

Pihak universitas diharapkan dapat memberikan kesempatan pada mahasiswanya untuk melaksanakan kerja praktek lapangan. Dengan memberikan kesempatan lebih sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan sesuai dengan bidang jurusan yakni akuntansi, agar dapat memberikan pengalaman yang lebih dan punya wawasan terkait akuntansi pemerintahan yang terkesan sangat sulit untuk dimasuki para mahasiswa.

3. Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, ditujukan mampu memakai variabel lain di mana bisa memberikan dampak dan masukan pada pemerintah dan masyarakat. Misal dengan menambahkan ukuran legislative sebagai tambahan variabel bebas. Menurut Sumarjo (2010) ukuran legislatif sangat penting karena DPRD ialah perwakilan dari warga biasa yang dipilih, untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan haknya. Dalam pelayanan yang diberikan pada masyarakat,

DPRD diharapkan lebih peka, terbuka dan lebih bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

5.3 Keterbatasan

1. Permintaan informasi data keuangan yang cenderung sulit karena tidak banyak informasi yang menyebutkan lembaga pemerintahan secara pasti untuk meminta laporan keuangan yang dimaksud. Sehingga peneliti masih harus melaksanakan pencarian manual yang memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.
2. Di pengkajian ini, peneliti menggunakan pendekatan regresi linier berganda memakai software SPSS versi 20 yang sering dipakai guna menganalisis terkait kinerja keuangan pemerintah daerah. Jadi, nilai keuanikan di riset ini cenderung kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Febriansyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Anggaran Dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Handra, H dan Maryati, S. 2009. *Analisis Pendpaatan Asli Daerah Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat*. Jurnal Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Jauhar, Fauzan. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi. Volume 4, Nomor 1.
- Kusumawardani. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Retnowati, Reny. 2016. *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada*

Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013). Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Saraswati dan Rioni. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada kab/kota Provinsi Sumatera)*. Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan. Jurnal ISSN Vol 9 No 2.

Sari. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*. Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. JOM Fekon Vol 3 No 1.

Sari dan Mustanda. 2019. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Udayana. Bali. ISSN Vol 8 Nomor 8.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. *Pengaruh Leverage Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal. Volume. 1: Nomor. 1: 1-6.

Simanullang, Gideon. 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012*. Fakultas Ekonomi

Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Umrah
Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1 : 1- 24.

Sudarmadji, A and Lana S. (2007). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Pada Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Gunadarma University. Jurnal. Vol.2. ISSN: 1858-2559.

Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Wafa, Moh. Sirril. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran PEmerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Weill, Laurent. 2003. *Leverage And Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis On European Countries*. Working Paper Series. SSRN May.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Keuangan

- Pendapatan Asli Daerah sebelum dibagi dengan nilai yang sama.

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	233,177,792,497.49	271,656,642,591.09	281,897,411,487.80
2	Kab. Banyuwangi	482,740,174,377.22	520,021,954,381.20	516,757,143,543.55
3	Kab. Blitar	302,540,062,676.13	407,530,973,690.43	422,738,491,399.68
4	Kab. Bondowoso	720,914,033,084.25	955,640,728,380.39	804,014,681,241.71
5	Kab. Bojonegoro	222,657,296,673.72	233,136,567,608.59	189,504,490,467.06
6	Kab. Gresik	924,657,913,563.07	1,031,387,734,236.41	1,191,799,202,154.29
7	Kab. Jember	593,175,154,485.65	635,305,965,623.24	640,243,830,361.32
8	Kab. Jombang	468,627,918,703.89	665,844,012,375.24	522,526,189,811.56
9	Kab. Kediri	494,413,404,880.18	513,773,026,141.24	649,630,917,159.76
10	Kab. Lamongan	481,752,331,399.49	604,587,635,067.78	507,680,928,067.59
11	Kab. Lumajang	300,263,112,642.77	325,045,892,762.36	361,388,610,784.38
12	Kab. Madiun	258,211,505,535.08	333,154,568,459.37	377,425,844,392.10
13	Kab. Magetan	203,465,853,559.25	243,732,143,559.50	238,172,331,190.57
14	Kab. Malang	583,846,309,201.31	669,361,940,836.91	763,117,874,061.91
15	Kab. Mojokerto	537,297,509,364.79	625,418,916,520.09	676,708,151,150.77
16	Kab. Nganjuk	402,347,144,361.43	478,462,299,146.24	445,589,935,500.99
17	Kab. Ngawi	269,979,788,588.80	283,608,932,666.80	309,326,829,397.26
18	Kab. Pacitan	168,559,638,378.38	211,689,109,365.52	165,244,644,988.69
19	Kab. Pamekasan	232,262,477,004.71	205,969,039,947.27	231,934,835,122.52
20	Kab. Pasuruan	700,151,909,602.40	701,199,341,703.47	736,238,743,114.30
21	Kab. Ponorogo	303,331,015,448.27	376,702,757,475.31	321,603,082,547.58
22	Kab. Probolinggo	254,884,191,561.70	300,398,775,730.94	261,450,104,582.37
23	Kab. Sampang	175,518,944,949.09	135,499,437,439.15	184,053,093,325.93
24	Kab. Sidoarjo	1,798,515,529,274.65	1,921,244,253,335.69	1,801,982,663,587.19
25	Kab. Situbondo	218,845,065,632.84	228,766,562,733.20	253,352,994,071.60
26	Kab. Sumenep	260,329,014,333.57	252,690,773,879.35	247,070,353,452.98
27	Kab. Trenggalek	257,977,450,483.50	233,490,679,200.57	422,488,717,357.63
28	Kab. Tuban	566,077,757,668.16	614,733,285,905.09	574,696,171,350.18
29	Kab. Tulungagung	510,549,330,895.05	953,892,026,432.44	577,544,166,624.22
30	Kota Batu	136,766,373,974.97	147,007,052,561.30	203,318,424,547.46
31	Kota Blitar	174,590,638,444.23	297,618,527,754.02	156,268,172,003.52
32	Kota Kediri	262,886,289,227.78	439,896,279,120.18	319,295,604,320.24
33	Kota Madiun	248,944,404,487.59	265,920,295,216.86	264,212,229,517.55

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
34	Kota Malang	491,189,243,955.35	603,794,666,883.32	718,337,293,395.35
35	Kota Mojokerto	231,875,337,605.94	256,381,213,286.13	232,591,456,675.38
36	Kota Pasuruan	145,036,603,027.92	131,837,446,162.42	163,732,730,981.11
37	Kota Probolinggo	183,680,648,895.19	212,846,009,771.41	191,597,662,537.99
38	Kota Surabaya	4,289,960,292,372.98	4,727,280,629,669.69	5,314,695,257,794.40

- Pendapatan Asli Daerah sesudah dibagi dengan nilai yang sama (10 Triliyun)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	0.023318	0.027166	0.028190
2	Kab. Banyuwangi	0.048274	0.052002	0.051676
3	Kab. Blitar	0.030254	0.040753	0.042274
4	Kab. Bondowoso	0.072091	0.095564	0.080401
5	Kab. Bojonegoro	0.022266	0.023314	0.018950
6	Kab. Gresik	0.092466	0.103139	0.119180
7	Kab. Jember	0.059318	0.063531	0.064024
8	Kab. Jombang	0.046863	0.066584	0.052253
9	Kab. Kediri	0.049441	0.051377	0.064963
10	Kab. Lamongan	0.048175	0.060459	0.050768
11	Kab. Lumajang	0.030026	0.032505	0.036139
12	Kab. Madiun	0.025821	0.033315	0.037743
13	Kab. Magetan	0.020347	0.024373	0.023817
14	Kab. Malang	0.058385	0.066936	0.076312
15	Kab. Mojokerto	0.053730	0.062542	0.067671
16	Kab. Nganjuk	0.040235	0.047846	0.044559
17	Kab. Ngawi	0.026998	0.028361	0.030933
18	Kab. Pacitan	0.016856	0.021169	0.016524
19	Kab. Pamekasan	0.023226	0.020597	0.023193
20	Kab. Pasuruan	0.070015	0.070120	0.073624
21	Kab. Ponorogo	0.030333	0.037670	0.032160
22	Kab. Probolinggo	0.025488	0.030040	0.026145
23	Kab. Sampang	0.017552	0.013550	0.018405
24	Kab. Sidoarjo	0.179852	0.192124	0.180198
25	Kab. Situbondo	0.021885	0.022877	0.025335
26	Kab. Sumenep	0.026033	0.025269	0.024707
27	Kab. Trenggalek	0.025798	0.023349	0.042249
28	Kab. Tuban	0.056608	0.061473	0.057470
29	Kab. Tulungagung	0.051055	0.095389	0.057754
30	Kota Batu	0.013677	0.014701	0.020332
31	Kota Blitar	0.017459	0.029762	0.015627
32	Kota Kediri	0.026289	0.043990	0.031930
33	Kota Madiun	0.024894	0.026592	0.026421
34	Kota Malang	0.049119	0.060379	0.071834
35	Kota Mojokerto	0.023188	0.025638	0.023259
36	Kota Pasuruan	0.014504	0.013184	0.016373
37	Kota Probolinggo	0.018368	0.021285	0.019160
38	Kota Surabaya	0.428996	0.472728	0.531470

- Ukuran Pemerintah Daerah (Total Aset) sebelum dibagi dengan nilai yang sama.

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	3,248,748,668,429.28	3,287,355,807,994.34	3,426,970,013,752.93
2	Kab. Banyuwangi	4,610,811,341,119.78	4,880,705,919,574.57	4,975,933,686,336.34
3	Kab. Blitar	4,469,504,443,760.58	4,793,167,337,757.56	4,792,936,045,154.75
4	Kab. Bondowoso	2,886,152,870,845.27	2,890,627,973,795.63	2,847,209,273,424.88
5	Kab. Bojonegoro	13,282,895,260,689.10	14,861,004,949,368.50	14,672,284,077,071.40
6	Kab. Gresik	6,219,174,906,927.20	6,193,948,015,545.13	6,145,239,675,305.55
7	Kab. Jember	5,357,867,741,978.09	54,183,063,374,353.00	6,678,082,501,106.94
8	Kab. Jombang	3,869,952,848,308.24	4,179,313,083,806.45	4,108,296,357,428.15
9	Kab. Kediri	4,920,090,045,491.02	5,313,548,762,974.15	5,323,852,141,842.34
10	Kab. Lamongan	5,414,658,472,857.71	5,689,396,549,755.05	5,785,543,747,143.35
11	Kab. Lumajang	2,514,794,540,106.72	2,778,996,536,860.88	2,889,522,261,736.62
12	Kab. Madiun	4,223,308,432,256.55	4,637,395,032,456.17	4,604,593,310,261.57
13	Kab. Magetan	2,298,167,654,335.31	2,466,676,994,872.03	2,425,552,143,164.55
14	Kab. Malang	6,979,914,952,728.97	6,193,666,905,313.11	5,888,273,678,261.12
15	Kab. Mojokerto	5,949,039,791,956.20	6,254,447,197,160.66	6,089,920,320,337.08
16	Kab. Nganjuk	3,382,531,774,633.41	3,821,564,127,343.71	3,924,587,299,235.91
17	Kab. Ngawi	4,100,095,419,124.12	4,214,719,474,692.82	4,188,336,295,095.68
18	Kab. Pacitan	2,167,475,675,889.87	2,211,712,683,788.63	2,123,848,401,860.38
19	Kab. Pamekasan	3,721,643,174,886.75	3,778,135,844,976.41	3,707,902,505,247.10
20	Kab. Pasuruan	4,373,811,204,267.72	4,350,293,789,323.61	4,518,700,225,390.95
21	Kab. Ponorogo	2,411,017,255,318.16	2,637,342,783,621.71	2,804,170,325,009.08
22	Kab. Probolinggo	2,668,588,429,375.46	3,112,795,766,025.50	3,165,871,683,023.05
23	Kab. Sampang	3,919,573,705,207.71	4,070,969,260,251.76	4,339,335,948,166.61
24	Kab. Sidoarjo	21,264,200,469,428.10	21,808,175,246,105.40	22,586,024,634,392.00
25	Kab. Situbondo	4,211,724,139,658.96	4,466,844,477,361.35	4,385,706,402,523.45
26	Kab. Sumenep	3,773,059,908,808.00	3,646,444,825,412.15	3,711,421,129,574.55

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
27	Kab. Trenggalek	2,352,295,099,885.28	2,662,665,506,348.75	2,851,539,501,744.49
28	Kab. Tuban	7,300,738,037,164.47	7,673,202,987,339.55	7,839,569,045,731.66
29	Kab. Tulungagung	3,996,357,932,651.92	4,519,315,298,797.94	4,393,120,892,237.25
30	Kota Batu	1,969,750,855,908.37	1,957,746,217,629.29	2,727,123,710,735.05
31	Kota Blitar	2,595,047,554,204.28	2,842,396,924,943.55	2,838,091,886,965.55
32	Kota Kediri	3,124,238,802,109.33	3,332,882,120,217.72	3,519,026,557,267.68
33	Kota Madiun	2,748,491,955,577.70	2,825,866,797,765.40	2,813,637,454,500.29
34	Kota Malang	6,498,491,837,328.99	8,187,699,936,926.33	8,310,492,992,685.47
35	Kota Mojokerto	2,003,337,615,154.63	2,038,123,156,594.69	2,120,040,262,434.71
36	Kota Pasuruan	3,089,488,205,289.50	3,205,076,129,182.08	3,209,665,663,026.01
37	Kota Probolinggo	1,795,835,839,578.07	1,865,800,687,948.79	1,937,969,357,082.90
38	Kota Surabaya	45,910,335,939,674.00	47,023,936,026,338.00	51,844,401,656,233.60

- Ukuran Pemerintah Daerah (Total Aset) sesudah dibagi dengan nilai yang sama (55 Trilyun)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	0.05907	0.05977	0.06231
2	Kab. Banyuwangi	0.08383	0.08874	0.09047
3	Kab. Blitar	0.08126	0.08715	0.08714
4	Kab. Bondowoso	0.05248	0.05256	0.05177
5	Kab. Bojonegoro	0.24151	0.27020	0.26677
6	Kab. Gresik	0.11308	0.11262	0.11173
7	Kab. Jember	0.09742	0.09851	0.12142
8	Kab. Jombang	0.07036	0.07599	0.07470
9	Kab. Kediri	0.08946	0.09661	0.09680
10	Kab. Lamongan	0.09845	0.10344	0.10519
11	Kab. Lumajang	0.04572	0.05053	0.05254
12	Kab. Madiun	0.07679	0.08432	0.08372
13	Kab. Magetan	0.04178	0.04485	0.04410
14	Kab. Malang	0.12691	0.11261	0.10706
15	Kab. Mojokerto	0.10816	0.11372	0.11073
16	Kab. Nganjuk	0.06150	0.06948	0.07136
17	Kab. Ngawi	0.07455	0.07663	0.07615
18	Kab. Pacitan	0.03941	0.04021	0.03862
19	Kab. Pamekasan	0.06767	0.06869	0.06742
20	Kab. Pasuruan	0.07952	0.07910	0.08216
21	Kab. Ponorogo	0.04384	0.04795	0.05098
22	Kab. Probolinggo	0.04852	0.05660	0.05756

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
23	Kab. Sampang	0.07126	0.07402	0.07890
24	Kab. Sidoarjo	0.38662	0.39651	0.41065
25	Kab. Situbondo	0.07658	0.08122	0.07974
26	Kab. Sumenep	0.06860	0.06630	0.06748
27	Kab. Trenggalek	0.04277	0.04841	0.05185
28	Kab. Tuban	0.13274	0.13951	0.14254
29	Kab. Tulungagung	0.07266	0.08217	0.07987
30	Kota Batu	0.03581	0.03560	0.04958
31	Kota Blitar	0.04718	0.05168	0.05160
32	Kota Kediri	0.05680	0.06060	0.06398
33	Kota Madiun	0.04997	0.05138	0.05116
34	Kota Malang	0.11815	0.14887	0.15110
35	Kota Mojokerto	0.03642	0.03706	0.03855
36	Kota Pasuruan	0.05617	0.05827	0.05836
37	Kota Probolinggo	0.03265	0.03392	0.03524
38	Kota Surabaya	0.83473	0.85498	0.94263

- *Leverage (X3)*

NO	Kota/Kabupaten	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	0.01428	0.02001	0.00750
2	Kab. Banyuwangi	0.01190	0.01493	0.01748
3	Kab. Blitar	0.01042	0.01162	0.00826
4	Kab. Bondowoso	0.00771	0.00294	0.00575
5	Kab. Bojonegoro	0.02788	0.00699	0.00572
6	Kab. Gresik	0.00457	0.00744	0.00991
7	Kab. Jember	0.02298	0.00174	0.01173
8	Kab. Jombang	0.00935	0.01674	0.01339
9	Kab. Kediri	0.00216	0.00628	0.00401
10	Kab. Lamongan	0.01144	0.01582	0.03577
11	Kab. Lumajang	0.03403	0.05909	0.06276
12	Kab. Madiun	0.00365	0.00652	0.00543
13	Kab. Magetan	0.00392	0.01099	0.00435
14	Kab. Malang	0.00860	0.01031	0.01216
15	Kab. Mojokerto	0.00578	0.01377	0.01343
16	Kab. Nganjuk	0.01567	0.01859	0.01024
17	Kab. Ngawi	0.00189	0.00234	0.00254
18	Kab. Pacitan	0.00262	0.00206	0.00304
19	Kab. Pamekasan	0.03395	0.02663	0.02812
20	Kab. Pasuruan	0.00879	0.01201	0.00612
21	Kab. Ponorogo	0.03546	0.02521	0.07712
22	Kab. Probolinggo	0.02387	0.01687	0.00799
23	Kab. Sampang	0.00423	0.01969	0.05493
24	Kab. Sidoarjo	0.00492	0.00460	0.00466
25	Kab. Situbondo	0.00479	0.01815	0.00321
26	Kab. Sumenep	0.00960	0.00810	0.01047
27	Kab. Trenggalek	0.01120	0.05768	0.08490
28	Kab. Tuban	0.00310	0.00630	0.00279
29	Kab. Tulungagung	0.01311	0.00769	0.01039
30	Kota Batu	0.00495	0.00349	0.00529
31	Kota Blitar	0.01140	0.01965	0.01053
32	Kota Kediri	0.00634	0.02031	0.00694

NO	Kota/Kabupaten	Tahun		
		2020	2021	2022
33	Kota Madiun	0.00454	0.00547	0.00523
34	Kota Malang	0.00199	0.00287	0.00497
35	Kota Mojokerto	0.01265	0.00769	0.05786
36	Kota Pasuruan	0.00267	0.00549	0.00302
37	Kota Probolinggo	0.00954	0.00674	0.00987
38	Kota Surabaya	0.01420	0.01594	0.01390

- **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi)**

NO	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Bangkalan	7.203965422	6.455891931	6.488054821
2	Kab. Banyuwangi	5.689546302	5.146566916	5.643373774
3	Kab. Blitar	6.413886689	5.629443823	4.975265458
4	Kab. Bondowoso	2.230791581	1.682546736	2.364272042
5	Kab. Bojonegoro	16.85322904	21.81948371	28.37949802
6	Kab. Gresik	2.688255158	3.095588194	2.982111707
7	Kab. Jember	5.559254529	5.873747325	6.502775044
8	Kab. Jombang	4.333599187	3.418163683	4.507040916
9	Kab. Kediri	4.671377399	5.717358254	4.855221326
10	Kab. Lamongan	4.603611476	3.734969577	6.279855248
11	Kab. Lumajang	5.650160387	5.508528607	6.22255654
12	Kab. Madiun	5.456003926	5.602023313	5.456766589
13	Kab. Magetan	8.799371807	7.274618276	8.276469543
14	Kab. Malang	5.674057734	5.786766143	5.674756927
15	Kab. Mojokerto	3.630450112	3.906672323	3.036380478
16	Kab. Nganjuk	4.914458963	4.143248004	5.981298048
17	Kab. Ngawi	7.95053012	7.775369088	7.416171731
18	Kab. Pacitan	9.315818458	6.220011921	10.05935976
19	Kab. Pamekasan	8.865479467	16.29329572	8.782217205
20	Kab. Pasuruan	4.625258016	3.762845745	4.686034631
21	Kab. Ponorogo	7.346876379	5.608177063	7.728837903
22	Kab. Probolinggo	6.704411557	7.439928967	8.963217718
23	Kab. Sampang	8.02245314	13.55237536	11.51573434
24	Kab. Sidoarjo	2.13767321	2.223151953	2.691430858
25	Kab. Situbondo	6.720887498	6.222709069	6.115780374
26	Kab. Sumenep	7.818052255	7.349942518	7.40793108
27	Kab. Trenggalek	6.168807512	7.880947528	5.130106784
28	Kab. Tuban	4.352359926	4.009837081	4.735410223
29	Kab. Tulungagung	4.426240255	2.484080709	4.320347097
30	Kota Batu	6.168574423	6.103267969	4.878533793
31	Kota Blitar	4.971946969	3.312980556	6.640066047
32	Kota Kediri	4.591058178	3.055884723	4.643811492
33	Kota Madiun	4.075734204	4.037598344	4.410886311
34	Kota Malang	4.282397388	3.686605465	3.046366611
35	Kota Mojokerto	3.469135724	3.718870685	4.575506203
36	Kota Pasuruan	5.686993883	6.512444242	5.736632746
37	Kota Probolinggo	4.778225065	4.221623817	5.637511721
38	Kota Surabaya	1.872437142	1.654032822	1.777757015

Lampiran 2 : Uji Instrumen

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	.01318	.53147	.0555691	.07691832
UPD	114	.03265	.94263	.1078517	.14306984
Leverage	114	.00174	.08490	.0138656	.01538226
KKP	114	1.65403	28.37950	5.9576344	3.62454831
Valid N (listwise)	114				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.22860833
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.105
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.195	.025		7.879	.000
PAD	-.268	.614	-.120	-.437	.663

UPD	.443	.330	.369	1.342	.182
Leverage	-.801	1.027	-.072	-.780	.437

a. Terikatt Variable: ABS_RES

3

c. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.111	8.978
1 UPD	.111	8.993
Leverage	.994	1.006

a. Terikatt Variable: KKP

d. Uji Autokolerasi

16

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.789 ^a	.622	.612	2.25879402	1.011

a. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, UPD

b. Terikatt Variable: KKP

29

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.869	.334		17.553	.000
1 PAD	-109.324	8.277	-2.320	-13.208	.000
UPD	53.107	4.454	2.096	11.924	.000
Leverage	31.470	13.854	.134	2.272	.025

a. Terikatt Variable: KKP

40

4. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	923.284	3	307.761	60.320	.000 ^b
Residual	561.237	110	5.102		
Total	1484.521	113			

a. Terikatt Variable: KKP

b. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, UPD

17

b. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.869	.334		17.553	.000
PAD	-109.324	8.277	-2.320	-13.208	.000
UPD	53.107	4.454	2.096	11.924	.000
Leverage	31.470	13.854	.134	2.272	.025

a. Terikatt Variable: KKP

15

c. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.622	.612	2.25879402

a. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, UPD